



**STUDI TENTANG PENURUNAN JUMLAH ANAK TIDAK SEKOLAH DI  
KABUPATEN PEKALONGAN (Sebuah Kajian Analisis Jejaring)**

**Januardi Panji Sukmawan, Ari Subowo, Teuku Afrizal**

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

**ABSTRACT**

*Children Out of School is one of the problems that occur in the field of education. Pekalongan Regency is one of the regions in Central Java with a fairly high number of Children Out of School (ATS), which is 4346 children. Pekalongan Regency Government is trying to overcome this problem with the “Gerakan Kudu Sekolah”. This study aims to analyze the collaborative networking process in the “Gerakan Kudu Sekolah” as an effort by the Pekalongan Regency government to reduce the number of children out of school. The analysis in this study uses the theory of Collaborative Governance from Ansell and Gash. The study in this study used descriptive qualitative research with data collection methods of interviews, observations, and literature studies. Meanwhile, the data sources used are primary data and secondary data as well as other sources relevant to the research topic. The result is that the collaborative networking process at the face to face dialogue stage has obstacles to lack of operational funding support, at the trust building stage it has gone well, then at the commitment to process stage more commitment is needed from the Kesesi District, then at the sharing understanding stage the efforts made it is good enough but there are still indications of a lack of mutual understanding at the Kesesi District level, while at the intermediate outcomes stage at the Kesesi District level there has not been a short-term target set.*

*Keyword : Children Out of School, Collaborative Networking, Kudu Sekolah*

**PENDAHULUAN**

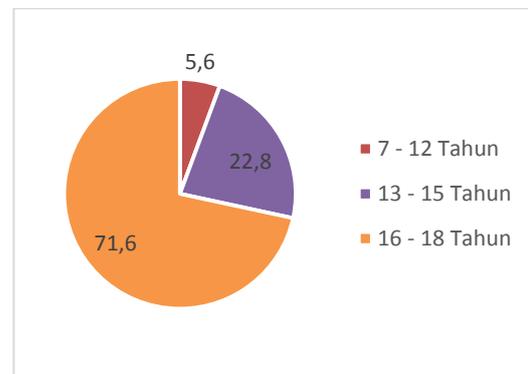
**A. Latar Belakang**

Pendidikan merupakan salah satu elemen penting sebuah bangsa dan amanat bangsa pada pembukaan UUD 1945.

Pemerintah RI dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjalankan fungsi pemerintah untuk menyediakan pendidikan dan fasilitas pendidikan bagi anak bangsa. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait melalui program-programnya berusaha menjamin pendidikan tersebar merata di Indonesia. Salah satu pekerjaan rumah besar pemerintah berkaitan dengan pendidikan adalah memastikan bahwa generasi bangsa dapat mengakses dan mengenyam pendidikan dengan layak dan tanpa diskriminatif.

Anak tidak sekolah (ATS) menjadi salah satu permasalahan di bidang pendidikan yang dihadapi pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan. Data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (susenas) 2019 menunjukkan setidaknya ada 4,3 juta anak tidak sekolah dalam rentang usia 7 – 18 tahun di seluruh Indonesia, dengan rincian yang disebutkan pada Gambar 1.1 dibawah ini :

**Gambar 1. 1 Data Anak Tidak Sekolah Nasional**



Sumber : *Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2019*

Pada Gambar 1.1 dapat diketahui bahwa dari rentang umur 7 hingga 18 tahun jumlah terbesar yaitu dalam rentang usia 16 sampai 18 tahun atau setara dengan usia anak Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 71, 6 persen. Sedangkan jumlah terbanyak kedua adalah rentang usia 13 – 15 tahun yang berjumlah 22,8 persen atau setara dengan usia anak Sekolah Menengah Pertama (SMP). Serta sisanya dalam rentang usia 7- 12 tahun atau yang setara dengan usia anak Sekolah Dasar (SD) berjumlah 5,6 persen.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) telah mengeluarkan strategi nasional penanganan anak tidak sekolah (Stranas ATS) pada tahun 2020 yang merupakan hasil kerja sama dengan UNICEF dan Kementerian/Lembaga lain

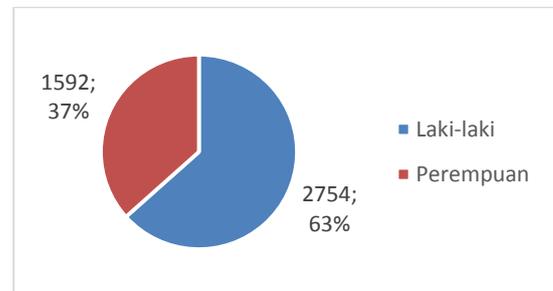
yang terkait. Strategi Nasional tersebut diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun strategi kebijakan bagi pemerintah, masyarakat serta seluruh pihak terkait dalam mengatasi isu dan permasalahan anak tidak sekolah.

Stranas ATS menurut Kementerian PPN/Bappenas memiliki tujuan untuk memastikan terciptanya penguatan, perbaikan, perluasan, dan membangun pola koordinasi yang lebih baik dan meningkatkan efektifitas dari program – program yang telah ada maupun yang akan diinisiasi oleh pemerintah daerah dan masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhan layanan pendidikan serta pelatihan yang berkualitas dan relevan bagi anak – anak di Indonesia. Stranas ATS yang disusun bersama dengan UNICEF ini telah melewati tahap kajian yang mendalam dan melewati proses uji coba (*pilot project*) di 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Brebes untuk mengetahui efektivitas penerapan di daerah serta sejauh mana relevansinya dalam mengakomodir kebutuhan dan situasi daerah dalam mengatasi masalah ATS.

Kabupaten Pekalongan menjadi salah satu daerah di Jawa Tengah dengan angka ATS yang cukup tinggi yaitu 4346 anak (data 2019). Berikut rincian data

Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2019.

**Gambar 1. 2 Data Anak Tidak Sekolah Kabupaten Pekalongan**



Sumber :[kudusekolah.pekalongankab.go.id](http://kudusekolah.pekalongankab.go.id)

Data pada Gambar 1.2 menunjukkan jumlah ATS di kabupaten pekalongan dengan rincian sebesar 63 % atau berjumlah 2754 anak yang merupakan anak laki-laki dan 37 % atau berjumlah 1592 anak yang merupakan anak perempuan yang secara keseluruhan berjumlah 4346 anak.

Pemerintah daerah (Pemda) mengambil peran penting di bidang pendidikan dan masalah penanganan ATS ini, terlebih di era otonomi daerah. Pendidikan menjadi salah satu bidang yang didesentralisasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan penyelenggaraannya menjadi salah satu kategori pelayanan dasar wajib yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah sehingga kini dikenal dengan era otonomi pendidikan. Pemerintah daerah dalam hal ini mencakup pemerintah daerah provinsi yang memegang wewenang pendidikan

menengah dan khusus serta pemerintah daerah kabupaten/kota yang memegang wewenang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan kesetaraan.

Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah berupaya mengatasi permasalahan ATS dengan inovasi program Gerakan Kudu Sekolah. Gerakan Kudu Sekolah ini diluncurkan oleh pemerintah Kabupaten Pekalongan pada pertengahan tahun 2019. Gerakan Kudu Sekolah merupakan sebuah program yang digagas oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang mengarah pada skema kolaborasi dan kerja sama multiaktor untuk menurunkan angka ATS di Kabupaten Pekalongan yang cukup tinggi.

Konsep kolaboratif atau multiaktor dapat menjadi salah satu solusi mengatasi keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah. Skema ini muncul dari adanya pergeseran paradigma dalam pelayanan public.

Konsep kolaboratif atau multiaktor ini juga sejalan dengan *stranas* ATS dimana pemerintah menyadari peran dan kontribusi berbagai pihak dalam keberhasilan penanganan masalah ATS ini. Oleh karena itu, salah satu *output* dari *stranas* ATS adalah pemetaan tanggung

jawab dan kewenangan lintas sector dalam mengatasi masalah ATS ini.

Pandemi Covid 19 yang mulai masuk di Indonesia pada awal 2020 membuat terganggunya keberjalanan beberapa bidang esensial seperti ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya tidak terkecuali Gerakan Kudu Sekolah ini. Beberapa permasalahan pokok yang dihadapi lainnya adalah seperti belum tercapainya target pengembalian ATS ke sekolah pada tahun – tahun sebelumnya dan juga bisa dilihat dari beberapa kecamatan yang perkembangannya dalam pengembalian ATS ke sekolah cenderung lambat dan memiliki jumlah ATS yang cenderung tinggi, yaitu kecamatan Kandangserang, Kecamatan Bojong, Kecamatan Kajen, Kecamatan Kesesi, dan Kecamatan Paninggaran.

Kecamatan Kesesi sebagai salah satu Kecamatan dengan jumlah ATS tertinggi mengalami permasalahan lambatnya pengembalian ATS. Sebagai gambaran, menurut keterangan dari pihak Kecamatan Kesesi pada tahun 2020 tidak ada sama sekali ATS yang dikembalikan ke sekolah. Padahal apabila dilihat dari *stakeholder* yang terlibat di Kecamatan Kesesi sudah terdapat *stakeholder* yang dapat mendukung berjalan jejaring kolaboratif seperti adanya organisasi masyarakat dari unsur keagamaan yang

memang terlibat dalam gerakan Kudu Sekolah.

## **B. Kerangka Teori**

### **Anak Tidak Sekolah**

Anak tidak sekolah merupakan sekelompok anak usia sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas atau dengan kata lain dalam rentang usia 7 – 18 tahun yang tidak pernah bersekolah baik di jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, SMA/ sederajat, putus sekolah tanpa menyelesaikan jenjang pendidikannya atau putus sekolah di tengah – tengah jenjang pendidikannya, putus sekolah tanpa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi (PPN/Bappenas, 2019).

### ***Collaborative Governance***

Proses Kolaborasi dalam gerakan Kudu Sekolah sebagai upaya penurunan jumlah anak tidak sekolah dapat dianalisis dengan menggunakan variabel proses kolaborasi dari model *collaborative governance* Ansell dan Gash (2007). Menurut Ansell dan Gash (2007) terdapat 5 tahapan dalam proses kolaborasi, yaitu : (1) *Face to Face Dialogue*, (2) *Trust Building*, (3) *Commitment to Process*, (4) *Sharing Understanding*, (5) *Intermediate Outcomes*.

## **METODE PENELITIAN**

Desain penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Situs penelitiannya adalah Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan. Subyek penelitiannya adalah perwakilan Dinas Pendidikan, Bappeda Litbang, dan pihak Kecamatan Kesesi. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Analisis data dilakukan dengan mereduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan, kualitas data menggunakan teknik triangulasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Analisis Proses Jejaring Kolaboratif dalam Penurunan Jumlah Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Pekalongan**

Pemerintah Kabupaten Pekalongan menyebutkan bahwa upaya ini dilakukan dengan pendekatan kolaborasi *Pentahelix* atau terdapat 5 unsur yang terlibat. Aktor yang terlibat dalam kolaborasi ini antara lain : 1) Pemerintah Daerah, 2) Dunia Usaha, 3) Pemerintah Desa, 4) Masyarakat Peduli, 5) Perguruan Tinggi.

#### **Proses Kolaborasi**

##### ***1. Face to Face Dialogue***

Proses Kolaborasi dimulai dan dibangun diatas dialog tatap muka. Dialog tatap muka bertujuan untuk membangun konsensus, kesepakatan, dan pemahaman bersama mengenai suatu permasalahan

### **Tingkat Kabupaten Pekalongan**

Dialog tatap muka awal dimulai pada kurun waktu 2018. Pada forum - forum awal ini, inti bahasan berkisar seputar *Grand Design* program dan dasar – dasar mengenai Gerakan Kudu Sekolah yang akan berjalan, termasuk pokok bahasan yang dilakukan dalam forum – forum awal adalah penentuan jumlah target ATS yang akan dikembalikan setiap tahunnya. Penentuan target ini penting karena akan berkaitan juga dengan penentuan anggaran yang akan diberikan untuk program ini sehingga dalam implementasi program akan terstruktur.

Sejak forum dialog awal, sudah terjadi kolaborasi lintas sektor dalam gerakan Kudu Sekolah ini. Hal ini bisa dilihat dari pengumpulan data yang membutuhkan dukungan data dari *stakeholder* lain seperti dinas sosial, dinas PMD, dinas kependudukan dan catatan sipil, hingga kemenag.

Forum – forum awal ini tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama karena selain perumusan *grand design* dan pendataan dibutuhkan waktu untuk

menyamakn persepsi dan pengertian mengenai gerakan Kudu Sekolah itu sendiri.

Selanjutnya, dalam keberjalanan gerakan Kudu Sekolah tentu dibutuhkan koordinasi melalui sebuah forum atau rapat. Dalam hal ini, forum yang diadakan bisa bersifat *insidental* hingga rapat rutin yang diadakan dalam jangka waktu tertentu.

Rapat rutin gerakan Kudu Sekolah di tingkat Kabupaten biasa diadakan satu kali dalam waktu dua bulan. Forum *insidental* diadakan ketika terdapat sebuah permasalahan yang membutuhkan jalan keluar dan aspirasi dari *stakeholder* lain yang terkait.

### **Tingkat Kecamatan Kesesi**

Proses dialog dan forum tatap muka juga terjadi di Kecamatan Kesesi. Setelah menerima arahan dari Kabupaten atau dalam hal ini Bappeda, selanjutnya Kecamatan dengan segera mengadakan forum untuk menyikapi arahan tersebut.

Tim Kudu Sekolah tingkat kecamatan sebagai koordinator di tingkat Kecamatan Kesesi selanjutnya melakukan koordinasi dengan pihak desa untuk kemudian melakukan rapat koordinasi dan pengkajian mengenai keadaan ATS yang berada di wilayah Kecamatan Kesesi.

Kolaborasi di tingkat kecamatan pun terdapat forum koordinasi yang diadakan secara rutin maupun *insidental*, bahkan menurut narasumber dari Bappeda, sudah terdapat buku panduan rapat koordinasi kecamatan di masing – masing kecamatan yang dapat digunakan sebagai panduan kecamatan dalam mengadakan forum komunikasi dan kolaborasi antar *stakeholder* di tingkat kecamatan.

Forum rutin yang diadakan di Kecamatan Kesesi kurang lebih 4 kali dalam waktu setahun selebihnya terdapat forum – forum yang diadakan secara *insidental* termasuk untuk mengetahui perkembangan pengembalian ATS di masing – masing desa.

Permasalahan yang mungkin menjadi hambatan dalam forum tatap muka secara khusus dan kolaborasi secara umum yaitu minimnya dukungan dana operasional baik di tingkat Kabupaten maupun Kecamatan. Terutama di tingkat kecamatan, minimnya dana yang memadai untuk menunjang kegiatan operasional seperti rapat dan forum tatap muka lainnya menjadi salah satu penghambat pengembalian ATS di tingkat Kecamatan.

## **2. Trust Building**

Kepercayaan antar *stakeholder* menjadi salah satu aspek yang paling menonjol di awal proses kolaborasi,

bahkan dapat menjadi salah satu aspek yang sulit untuk dikembangkan apabila terdapat riwayat antagonism antar *stakeholder* (Ansell & Gash, 2007).

### **Tingkat Kabupaten Pekalongan**

Tim Kudu Sekolah memiliki komitmen dan kepercayaan antar *stakeholder* yang diwujudkan dalam Surat Keputusan Bupati mengenai pembentukan tim Kudu Sekolah di tingkat Kabupaten.

Adanya surat keputusan ini, diharapkan dapat mengikat semua *stakeholder* yang berada dalam lingkup tim Kabupaten untuk berkomitmen dan saling percaya satu sama lain dalam mensukseskan gerakan Kudu Sekolah itu sendiri.

Salah satu yang dilakukan oleh Tim Kabupaten untuk membangun komitmen dan kepercayaan adalah dengan mengadakan lokakarya lintas sektor yang dihadiri secara langsung oleh Bupati dan semua Camat yang ada di wilayah Kabupaten Pekalongan. Selain itu, diadakan juga penanda tangan pakta dukungan terhadap gerakan Kudu Sekolah oleh semua Camat. Penanda tangan ini bertujuan agar masing – masing camat memiliki komitmen dan tanggung jawab dalam mendukung suksesnya gerakan Kudu Sekolah.

Membangun kepercayaan berkaitan erat dengan pola komunikasi yang dilakukan antar *stakeholder*. Kunci utama dalam membangun komitmen dan kepercayaan adalah dengan memberikan pemahaman bahwa gerakan Kudu Sekolah ini akan bermanfaat bagi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan generasi mendatang. Pemberian pemahaman tersebut tentunya harus dilakukan dengan pola komunikasi yang tepat dan dilakukan secara *intens*.

Sebagai sebuah gerakan yang melibatkan banyak pihak, Gerakan Kudu Sekolah tentu menguras tenaga semua *stakeholder*, sehingga wajar apabila mereka melihat apa yang akan mereka dapatkan dari program ini. Namun dengan pemahaman bahwa gerakan Kudu Sekolah ini akan memberikan manfaat yang luas yang dapat dirasakan oleh semua pihak akan memunculkan kemauan *stakeholder* untuk saling bekerja sama dalam gerakan Kudu Sekolah ini.

### **Tingkat Kecamatan Kesesi**

Membangun kepercayaan antar *stakeholder* tersebut menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan oleh seluruh pihak yang terlibat, utamanya pemimpin kolaborasi di tingkat kecamatan. Pihak kecamatan kesesi membangun komunikasi intensif dengan pihak desa baik melalui

jalur formal maupun informal seperti melalui teknologi *Whatsapp* dan sejenisnya.

Tidak jauh berbeda dengan upaya di tingkat kabupaten, upaya membangun kepercayaan di Kecamatan Kesesi adalah melalui rapat dan komunikasi yang intens. Komunikasi secara informal melalui media sosial seperti *Whatsapp* menjadi model komunikasi yang efektif untuk meningkatkan kepercayaan di tingkat Kecamatan Kesesi.

### **3. *Commitment to Process***

Tingkat komitmen *stakeholder* terhadap proses kolaborasi menjadi salah satu faktor penentu berhasil atau gagalnya sebuah kolaborasi, terlebih di tingkat pimpinan kolaborasi. Komitmen juga dapat dipahami dengan menjalankan apa yang menjadi tugasnya dalam kolaborasi.

### **Tingkat Kabupaten Pekalongan**

Dinas Pendidikan mewujudkan komitmennya dalam bentuk menjadi *leading sector*, memberikan alokasi dana dan melakukan sosialisasi pentingnya pendidikan. Bappeda selain menjadi *leading sector* bersama Dinas Pendidikan juga berperan dengan melakukan pendekatan, pendataan, dan memasukkan gerakan Kudu Sekolah ke dalam dokumen perencanaan daerah.

Dunia Usaha atau bisa disebut juga dengan pihak swasta turut berperan dan memberikan komitmennya dalam bentuk dukungan dana yaitu dana CSR (*Corporate Social Responsibility*).

Perguruan tinggi juga memiliki peran dalam gerakan Kudu Sekolah. Komitmen perguruan tinggi diwujudkan melalui kegiatan – kegiatan akademik yang secara langsung maupun tidak langsung akan mendukung gerakan Kudu Sekolah seperti melalui kegiatan sosialisasi, KKN tematik atau penelitian terutama untuk perguruan tinggi di sekitar Kabupaten Pekalongan.

#### **Tingkat Kecamatan Kesesi**

Pada tingkat Kecamatan Kesesi, dapat dilihat komitmen dari masyarakat dan pihak desa serta pihak kecamatan itu sendiri.

Peran masyarakat dalam kolaborasi ini memang belum terlalu jelas terlihat. Masyarakat dapat berperan menjadi relawan yang dapat turut serta aktif dalam membujuk anak tidak sekolah di tingkat desa dan kecamatan.

Desa menjadi ujung tombak karena bersentuhan langsung dengan ATS. Walaupun ujung tombak dari gerakan ini ada di pihak desa yang langsung bersentuhan dengan ATS yang

bersangkutan. Namun pemerintah Kecamatan Kesesi menegaskan bahwa mereka terlibat secara langsung untuk membujuk ATS agar bersedia kembali sekolah.

Keterlibatan pihak Kecamatan untuk secara langsung membujuk ATS merupakan salah satu bentuk komitmen ketika pihak Desa tidak lagi mampu membujuk ATS. Namun komitmen ini kurang terjaga karena hanya dilakukan ketika pihak desa sudah tidak mampu. Selain itu, dibuktikan dengan pencapaian pengembalian yang masih rendah.

#### **4. *Sharing Understanding***

Ansell & Gash (2007) mengatakan dalam sebuah proses kolaboratif, semua *stakeholder* harus membangun pemahaman bersama tentang tujuan kolektif yang akan dicapai.

#### **Tingkat Kabupaten Pekalongan**

Beberapa *stakeholder* dalam kolaborasi penurunan jumlah ATS di Kabupaten Pekalongan memahami pentingnya adanya kesepakatan bersama dalam kolaborasi.

Membangun pemahaman bersama memakan waktu yang cukup lama sebagaimana membangun komitmen. Bappeda sebagai koordinator dalam kolaborasi berusaha untuk membangun

pemahaman bersama melalui beberapa pendekatan dengan *stakeholder* yang terlibat seperti dengan mengadakan forum – forum yang berkaitan dengan ATS. Bappeda juga membuat buku profil Kudu Sekolah yang berisi mengenai seluruh hal yang berkaitan dengan ATS dan Gerakan Kudu Sekolah.

Salah satu hal pokok yang penting dalam membangun pemahaman bersama dalam kolaborasi dan cenderung memakan waktu yang lama adalah upaya terciptanya sebuah pemahaman bahwa pendidikan merupakan salah satu investasi bagi masa depan generasi saat ini.

Upaya membangun pemahaman bersama yang paling signifikan adalah adanya dokumen – dokumen pendukung yang berisi segala hal yang berkaitan dengan gerakan Kudu Sekolah itu sendiri.

### **Tingkat Kecamatan Kesesi**

Pemahaman bersama harus dibangun di semua tingkatan dalam kolaborasi penurunan jumlah ATS ini termasuk di tingkat Kecamatan Kesesi. Sebagaimana cara membangun bersama di tingkat Kabupaten, pemahaman bersama di tingkat Kecamatan Kesesi dibangun seiring dengan dibangunnya komunikasi yang baik antar *stakeholder* yang terlibat.

Selain dengan membangun komunikasi yang baik, adanya dokumen yang dapat mendukung terciptanya pemahaman bersama menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam membangun pemahaman bersama. Respon dari *stakeholder* dalam kolaborasi juga menjadi salah satu faktor yang dapat mendukung terciptanya pemahaman bersama. Respon ini menjadi indikasi adanya keinginan dari *stakeholder* untuk terlibat secara aktif dalam kolaborasi.

Namun lambatnya proses pengembalian ATS di tingkat Kecamatan Kesesi dapat menjadi salah satu indikasi kurangnya pemahaman bersama oleh beberapa *stakeholder* di tingkat Kecamatan Kesesi

## **5. *Intermediate Outcomes***

Hasil yang dimaksud disini adalah hasil sementara. Selain sebagai *output* yang bersifat *tangible* (dapat diukur), hasil sementara yang didapat juga dapat menjadi batu loncatan untuk mencapai kesuksesan dalam kolaborasi (Ansell & Gash, 2007).

### **Tingkat Kabupaten Pekalongan**

Hasil sementara dari kolaborasi dalam gerakan Kudu Sekolah ini dapat dilihat dari capaian target setiap tahunnya. Dalam gerakan Kudu Sekolah terdapat target jumlah ATS yang akan

dikembalikan ke sekolah setiap tahun. Target ini bertujuan agar kolaborasi yang berjalan lebih terukur. Hal ini juga akan berpengaruh dalam aspek lain dalam kolaborasi seperti pendanaan dan lainnya.

Target setiap tahun sudah dirancang sejak awal penyusunan *Grand Design* Gerakan Kudu Sekolah. Namun dikarenakan adanya pandemi Covid – 19 yang masuk ke Indonesia pada awal 2020, pencapaian target setiap tahunnya menjadi terhambat.

### **Tingkat Kecamatan Kesesi**

Hasil sementara di Kecamatan Kesesi belum terlalu terlihat hal ini bisa dilihat dari jumlah ATS yang dikembalikan ke sekolah. Pada tahun 2019 ketika program ini pertama dirintis hanya ada 2 ATS yang dikembalikan ke sekolah. Sedangkan pada tahun 2020 tidak ada sama sekali ATS yang dikembalikan ke sekolah.

Tim Kudu Sekolah di tingkat Kecamatan Kesesi sendiri memang belum menentukan target yang akan dicapai pada setiap tahunnya. Berbeda dengan tingkat Kabupaten yang telah menentukan target pengembalian ATS untuk setiap tahunnya. Peneliti menganggap pentingnya menentukan target yang akan dicapai pada setiap tahunnya di tingkat Kecamatan

Kesesi. Adanya target ini akan membuat kinerja semakin terukur.

### **Alur Teknis Pengembalian Anak Tidak Sekolah**

Tim Kudu Sekolah di tingkat Kabupaten telah merumuskan mekanisme pengembalian ATS yang tercantum dalam buku Panduan Pelaksanaan Gerakan Kudu Sekolah. Alur teknis tersebut yaitu :

#### 1. Pendataan awal

Pendataan awal merupakan penyiapan data awal yang akan menjadi basis data utama dalam Gerakan Kudu Sekolah. Data ini dihimpun dari berbagai sumber dengan melibatkan beberapa *stakeholder* atau OPD lain yang terkait seperti Dinas Sosial, Kanwil Kemenag, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan lainnya.

#### 2. Verifikasi dan Validasi Data

Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dihimpun dari sumber – sumber yang berupa dokumen sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Terdapat 3 langkah yang harus dilakukan dalam tahapan ini, yaitu : (1) *Home Visit*, (2) Pengolahan Data, dan (3) Rencana Tindak Lanjut.

#### 3. Rekonfirmasi Data

Rekonfirmasi data atau pemutakhiran data dilakukan untuk mengantisipasi perubahan data seiring berjalannya waktu.

#### 4. Pendampingan Anak dan Keluarga ATS

Pendampingan dilakukan untuk menjalin komunikasi dengan ATS dan keluarga ATS. Termasuk dari tahapan pendampingan adalah dengan menjelaskan hal – hal yang berkaitan dengan gerakan Kudu Sekolah.

#### 5. Pemilihan Satuan Pendidikan

Tahapan ini dilakukan dengan memilih satuan pendidikan baik formal maupun non formal yang akan menjadi tempat ATS untuk kembali bersekolah. Pemilihan ini disesuaikan dengan kondisi ATS dan kesepakatan antara pendamping dengan ATS.

#### 6. Pendampingan Peserta Didik dan Satuan Pendidikan

Pendampingan pada anak yang telah kembali sekolah dilakukan dengan pendekatan personal yaitu dengan memberikan penjelasan mengenai pentingnya pendidikan dan hal – hal yang bersifat psikologis lainnya. Sedangkan, Pendampingan terhadap satuan pendidikan adalah dengan memberikan sosialisasi

kepada satuan pendidikan baik formal maupun non formal seperti PKBM.

#### 7. Monitoring Perkembangan Peserta Didik

Tahapan terakhir setelah ATS kembali ke sekolah adalah dengan melakukan pemantauan secara berkala peserta didik secara rutin setiap bulan. Hasil monitoring ini dilaporkan kepada tim pengawas sekolah dan tim Kudu Sekolah tingkat desa melalui aplikasi Kudu Sekolah.

#### **Hambatan dalam Proses Pengembalian Anak Tidak Sekolah ke Sekolah**

Beberapa hambatan yang ditemukan dalam proses pengembalian Anak Tidak Sekolah, yaitu :

1. Tim Desa yang tidak bergerak secara menyeluruh, hanya beberapa yang memang bergerak padahal tim Desa adalah salah satu ujung tombak dalam gerakan Kudu Sekolah ini.
2. Kurangnya penguasaan terhadap teknologi di tingkat desa. Hal ini akan sangat berpengaruh mengingat gerakan ini menggunakan aplikasi yang berbasis android.

3. Tahapan – tahapan dalam pendataan yang tidak dilakukan secara tuntas.
4. Faktor anak tidak sekolah yang enggan kembali bersekolah dengan alasan sudah bekerja, menikah, atau pun sudah nyaman tidak bersekolah. Faktor ini menjadi salah satu hambatan yang paling dirasakan oleh semua *stakeholder*. Hal ini juga dipengaruhi kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pendidikan.
5. Tidak adanya dukungan anggaran operasional di tingkat kecamatan.

## PENUTUP

### A. Simpulan

- Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah melakukan upaya untuk menurunkan jumlah Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Pekalongan melalui Gerakan Kudu Sekolah. Gerakan ini mengusung konsep kolaborasi *pentahelix* yang melibatkan 5 unsur yaitu Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Dunia Usaha, Masyarakat Peduli dan Perguruan Tinggi.
- Proses Jejaring Kolaboratif yang terbentuk dalam Gerakan Kudu Sekolah dianalisis menggunakan teori *collaborative governance* dari

Ansell dan Gash. Teori ini menyebutkan proses kolaborasi yang terdiri dari beberapa tahap yaitu Dialog Tatap Muka, Membangun Kepercayaan, Komitmen Terhadap Proses, Pemahaman Bersama, dan Hasil Sementara.

- Tahapan Forum Tatap Muka dalam kolaborasi penurunan jumlah anak tidak sekolah sudah terbentuk. Forum ini diadakan secara rutin dan *insidental* baik di tingkat Kabupaten Pekalongan maupun Kecamatan Kesesi. Hambatan yang dirasakan dalam forum tatap muka adalah minimnya dukungan dana operasional terutama di tingkat Kecamatan Kesesi.
- Terdapat dua upaya yang dilakukan dalam tahap Membangun Kepercayaan. *Pertama*, Surat Keputusan dan Pakta Penandatanganan dukungan oleh camat, dimana kedua dokumen tersebut bersifat mengikat. *Kedua*, adalah membangun pola komunikasi yang intensif baik di komunikasi formal maupun informal melalui media sosial.
- Tahap Komitmen pada Proses di kedua tingkatan yaitu Kabupaten Pekalongan dan Kecamatan Kesesi

sudah terwujud dalam bentuk memainkan perannya masing – masing. Komitmen di tingkat Kabupaten Pekalongan lebih terjaga, hal ini dikarenakan tim Kabupaten merupakan pemimpin dari kolaborasi ini. Sedangkan Komitmen dari pihak Kecamatan Kesesi sudah terbentuk namun dibutuhkan komitmen yang lebih untuk mencapai hasil yang lebih maksimal di tingkat Kecamatan Kesesi.

- Upaya dalam tahapan membangun pemahaman bersama yang paling signifikan adalah adanya dokumen – dokumen yang berisi seluruh informasi yang berkaitan dengan gerakan Kudu Sekolah. Dokumen tersebut dibagikan secara merata kepada seluruh *stakeholder* untuk mendukung terciptanya pemahaman bersama. Namun lambatnya proses pengembalian ATS di tingkat Kecamatan Kesesi dapat menjadi salah satu indikasi kurangnya pemahaman bersama oleh beberapa *stakeholder* di tingkat Kecamatan Kesesi. Oleh karena itu, pemimpin kolaborasi di tingkat Kecamatan Kesesi harus dapat mengatasi hal tersebut.
- Hasil sementara didapatkan dari target jangka pendek yang ditentukan di tiap tahunnya. Pada tingkat Kabupaten, terdapat target jangka pendek di tiap tahun yang ditentukan pada saat perumusan *grand design*. Namun di tingkat Kecamatan Kesesi belum terdapat penentuan target setiap tahunnya.
- Adapun beberapa hambatan yang paling dirasakan dalam upaya menurunkan jumlah anak tidak sekolah ini adalah :
  1. Kurangnya antusiasme di tingkat Desa terhadap gerakan Kudu Sekolah
  2. Kurangnya penguasaan terhadap teknologi, mengingat gerakan ini menggunakan teknologi yang berbasis android.
  3. Kurangnya pemahaman terhadap gerakan Kudu Sekolah sehingga menyebabkan tidak tuntasnya tahapan – tahapan yang dilakukan dalam pengembalian anak tidak sekolah.
  4. Faktor anak tidak sekolah yang enggan kembali bersekolah dengan alasan sudah menikah, bekerja, hingga perasaan nyaman tidak bersekolah. Semua alasan tersebut dipengaruhi oleh kurangnya

pemahaman mengenai pentingnya pendidikan.

5. Tidak adanya dukungan anggaran operasional di tingkat Kecamatan. Anggaran operasional ini digunakan untuk mengadakan rapat dan forum hingga untuk pembinaan anak tidak sekolah di tingkat desa.

## **B. Saran**

1. Memberikan pemahaman kepada pihak desa agar memiliki tanggung jawab terhadap upaya pengembalian anak tidak sekolah.
2. Meningkatkan komunikasi dengan seluruh *stakeholder* yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman bersama yang menyeluruh mengenai gerakan Kudu Sekolah.
3. Meningkatkan sosialisasi baik secara langsung maupun melalui media dengan memanfaatkan peran perguruan tinggi atau pun masyarakat peduli untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya pendidikan
4. Meningkatkan dukungan anggaran operasional, hal ini bertujuan agar kegiatan operasional seperti forum tatap muka dapat ditingkatkan efektivitas dan intensitasnya. Dukungan operasional ini juga dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan peran dunia usaha.

5. Kecamatan Kesesi dapat meningkatkan komitmennya dalam wujud kegiatan yang nyata seperti ikut mendampingi pihak desa dalam membujuk anak tidak sekolah atau pun dengan mengadakan rapat yang lebih intensif.

6. Kecamatan Kesesi dapat memainkan perannya sebagai koordinator dengan lebih signifikan seperti dengan menentukan target pengembalian anak tidak sekolah pada setiap tahunnya. Hal ini akan mempengaruhi kinerja tim Kudu Sekolah di tingkat Kecamatan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ansell, C., & Gash, A. (2007). *Collaborative Governance in Theory and Practice*. 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Bitterman, P., & Koliba, C. J. (2020). Modeling Alternative Collaborative Governance Network Designs: An Agent-Based Model of Water Governance in the Lake Champlain Basin, Vermont. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 30(4), 636–655. <https://doi.org/10.1093/jopart/muaa013>

- BPS. (2020). *Kabupaten Pekalongan dalam Angka* (Vol. 148).
- Dwiyanto, A. (2017). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli Inklusif dan Kolaborasi*. In *UGM Press*.
- Haryono, N. (2012). Jejaring untuk membangun kolaborasi sektor publik. *Jurnal Jejaring Administrasi Publik*, 1(4), 48.
- Islamy, L. O. S. (2018). *COLLABORATIVE GOVERNANCE Konsep dan Aplikasi* (Cetakan I). Deepublish Publisher.
- Kabupaten Pekalongan, P. (2017). *RPJMD KAB\_PEKALONGAN 2016-2021*.
- Keban, Y. T. (2004). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep. In *Teori dan Isu*, Yogyakarta: Gava Media.
- Litbang, B. (2020). *Profil Kudu Sekolah*.
- PPN/Bappenas, K. (2019). *Strategi Nasional Penanganan Anak Tidak Sekolah di Indonesia*.
- Rethemeyer, R. K., & Hatmaker, D. M. (2008). Network management reconsidered: An inquiry into management of network structures in public sector service provision. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 617–646.  
<https://doi.org/10.1093/jopart/mum027>
- Sedgwick, D. (2017). Building collaboration: Examining the relationship between collaborative processes and activities. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 27(2), 236–252.  
<https://doi.org/10.1093/jopart/muw057>